

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM KURIKULUM 2013 DI SMAN 4 WATAMPONE

Oleh: Syahril
Dosen STAIN Watampone

Abstract. This research has purpose to know implemnetasi guidance and counseling program in Curriculum 2013. This research is classified as descriptive qualitative research by using pedagogical, psychological, and sociological approach. Implementation of research conducted at SMAN 4 Watampone Kab. Bone. The subjects of the study consisted of 1 leader and 4 counseling and guidance teachers using purposive sampling samples whose number could occasionally increase by using snowball sampling in line with the development of research data needs. Implementation of guidance and counseling in Curriculum 2013 at SMAN 4 Watampone shows that the interest of learners in Curriculum 2013 become a thing of counseling and counseling in various dimensions ranging from philosophy framework to its technical implementation.

Kata Kunci: Bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013.

A. Pendahuluan

Kurikulum merupakan sebuah kerangka yuridis-pedagogis yang mengarahkan pola pembinaan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Menyikapi hal tersebut, Nana Syaodih Sukmadinata bahwa kurikulum merupakan kunci dalam kesuksesan pendidikan serta berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan yang pada akhirnya akan bermuara pada penentuan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan.¹ Dalam tataran yang lebih bersifat operasional dan makro, Zainal Arifin menggambarkan pergeseran pemahaman tentang eksistensi kurikulum dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pendidikan. Menurutnya telah terjadi pergeseran makna di dunia modern untuk mendefinisikan kurikulum yang tadinya hanya

¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. v

memahami kurikulum sebatas mata pelajaran, kemudian kurikulum juga dimaknai yang lebih luas. Pengertian kurikulum yang lebih luas di dunia modern didefinisikan yaitu semua kegiatan dan pengalaman potensi (isi/materi) yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.²

Apa yang dikemukakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata dan Zainal Arifin di atas, paling tidak, telah mampu menggambarkan posisi kurikulum yang sangat urgen dalam pencapaian tujuan pendidikan. Konsekuensinya, eksistensi pendidikan sebagai sebuah wadah pembinaan peserta didik dengan domain kognitif, psikomotorik, dan afektifnya dalam merespon arus perubahan global menuntut kurikulum selalu berinovasi dalam merespon arus perubahan tersebut. Salah satu wujud dari inovasi kurikulum tersebut adalah dengan lahirnya Kurikulum 2013 yang merupakan suatu kurikulum yang memberikan penekanan pada kemandirian peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi yang dimilikinya yang tentunya tetap berada dalam bimbingan orang-orang yang di sekitarnya.

Pada dasarnya, pengembangan Kurikulum 2013 didasari oleh berbagai kelemahan-kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya yang dalam hal ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu: 1) Kontenkurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak, 2) Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, 3) Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skills* dan *hard skills*, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum, 4) Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global, 5) Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga

²Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4

membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru, 6) Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala, 7) Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi-tafsir.³

Sebagai kurikulum yang muncul dari pembaruan yang tentunya dilandasi dengan berbagai pertimbangan serta inovasi yang merupakan jawaban solutif terhadap berbagai kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya, Kurikulum 2013 muncul dengan memberikan beberapa keunggulan seperti yang digambarkan oleh E. Mulyasa sebagai berikut: 1) Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual) karena berfokus dan bermuara pada hakekat siswa untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hal ini siswa merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan, 2) Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu, 3) Ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan, 4) Lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan kesemua program studi., 5) Asumsi dari Kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka, 6) Kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan

³Bashori, *Manajemen Perubahan KTSP 2006 ke Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Kediri*, (Tesis: Program Studi Pendidikan Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 49-50

pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus menerus.⁴

Dari berbagai keunggulan yang ada pada Kurikulum 2013, dapat dicapai melalui bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu konseling mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir.⁵ Untuk mencapai tujuan tersebut guru BK perlu melakukan berbagai pelayanan kepada siswa di sekolah. Agar semua siswa mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling, guru BK harus mengemas pelayanan bimbingan dan konseling dalam bentuk program bimbingan dan konseling.

Program bimbingan dan konseling diartikan seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara kait mengait untuk mencapai tujuan. Program BK di sekolah memuat empat komponen program BK, yaitu (1) pelayanan dasar, (2) pelayanan peminatan dan perencanaan individual (3) pelayanan responsif, dan (4) dukungan sistem.⁶

Dalam Kurikulum 2013 kegiatan bimbingan dan konseling, program bimbingan dan konseling, di samping di isi dengan berbagai kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan, juga diisi dengan pelayanan peminatan yang membesarkan kemandirian peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka masing-masing.⁷ Dengan demikian, pelayanan peminatan peserta didik di satu sisi harus dilakukan, dan di sisi lain layanan peminatan itu tidak boleh melemahkan pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh. Jabaran program pelayanan peminatan peserta didik tersebut tertuang dalam program bimbingan dan konseling secara menyeluruh.

⁴E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 164.

⁵Departemen Pendidikan Nasional. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan konseling dalam Jalur Pendidikan Formal* (Bandung: UPI Bandung, 2007), h. 197

⁶Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 111. Taun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

⁷Kementerian Pendidikan Nasional. *Modul Diklat Peningkatan Kompetensi Guru BK/Konselor SMP/MTs* (Jakarta: Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani Dan Bimbingan Konseling, 2013), h. 2

Dari uraian di atas, sangatlah jelas bahwa yang ditekankan dalam bimbingan dan konseling pada kurikulum 2013 adalah peminatan siswa. Bidang peminatan ini menjadi substansi pokok pekerjaan guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah/madrasah. Meskipun demikian, pelayanan bimbingan dan konseling tentulah tidak hanya sekedar menangani program atau wilayah peminatan saja. Tugas konselor jauh lebih luas daripada bidang peminatan itu sendiri, yaitu menyangkut pengembangan pribadi peserta didik ke arah kemandirian diri yang juga mampu mengendalikan diri.

Untuk melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah terutama dalam implementasinya dalam kurikulum 2013, tentunya tidaklah mudah seperti yang dibayangkan guru bimbingan dan konseling. Ada berbagai hambatan yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah, termasuk yang dialami beberapa sekolah di Kab. Bone yang telah menerapkan kurikulum 2013, termasuk SMAN 4 Watampone.

Menurut A. Mapperassa, guru BK di SMAN 4 Watampone. Sebagai salah satu sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013 di Kab. Bone, SMAN 4 Watampone A. Mapparessa mengatakan bahwa:

“Sejak pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah kami, untuk bimbingan dan konseling belum dapat berjalan dengan baik terutama dalam pelaksanaan program BK pada Kurikulum 2013. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan mulai dari penyusunan program BK, pelaksanaan dan evaluasi program BK. Hal ini disebabkan karena karena masih kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam BK.”⁸

Sebagai bahan perbandingan atas apa yang dilakukan oleh SMAN 4 Watampone, peneliti mencoba mewawancarai Guru BK MAN 2 Watampone yang menjelaskan kendala implementasi bimbingan konseling pada Kurikulum 2013 di MAN 2 Watampone yang dalam hal ini adalah Ridwan, guru BK di MAN 2 Watampone. Dia mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program BK Kurikulum 2013 di MAN 2 belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan masih ada guru BK yang belum memahami dengan baik bimbingan dan konseling pada Kurikulum

⁸A. Mapperassa. Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 27 Juni 2016

2013 terutama bagaimana membantu siswa dalam memilih dan menetapkan pada kelompok peminatan mata pelajaran”⁹

Melihat fenomena yang terjadi di atas, tentu disayangkan pelaksanaan bimbingan dan konseling pada kurikulum 2013 belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini akan menghambat pencapaian tujuan bimbingan dan konseling yaitu, agar konseling:

(1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang, (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya, (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam penyelesaian studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.¹⁰

Berdasarkan realita tersebut, maka perlu diteliti lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Implementasi Bimbingan dan Konseling pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone*”

B. Metode

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan pedagogis, psikologis, serta sosiologis. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di SMAN 4 Watampone Kab. Bone

Subyek penelitian terdiri dari 1 pimpinan dan 4 guru bimbingan dan konseling dengan menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yang jumlahnya sewaktu-waktu dapat bertambah dengan menggunakan sampel bola salju (*snowball sampling*) seiring dengan perkembangan kebutuhan data penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan data dan sumbernya sebagai berikut: 1) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang dalam hal ini adalah para unsur pimpinan dan guru bimbingan dan konseling pada kedua lembaga pendidikan yang diteliti

⁹Ridwan. Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 28 Juni 2016

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, h. 197

melalui wawancara dan observasi partisipatif, 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan penelusuran referensi sebagai pelengkap atas data primer yang diperoleh untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan komprehensif tentang implementasi program bimbingan dan konseling Kurikulum 2013.

Pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan metode triangulasi metode pengumpulan data yang terdiri dari: 1) Wawancara (*Interview*), yaitu metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan menggunakan pedoman wawancara. Metode pengumpulan data dengan wawancara ini ditujukan kepada para unsur pimpinan pada kedua lembaga pendidikan yang diteliti yang terpilih sebagai informan., 2) Observasi (*Observation*), yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan sekaligus partisipasi langsung pada kedua lembaga pendidikan yang diteliti. Dalam tahapan observasi partisipatif ini, peneliti akan mengamati beberapa hal yang berkaitan bimbingan dan konseling pada implementasi Kurikulum 2013 dengan fokus pada perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program. Metode ini juga menjadi media konfirmasi atas data yang diperoleh dari informan melalui wawancara sehingga bias informasi dan data sedapat mungkin dapat diminimalisir., 3) Dokumentasi (*Documentation*), yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat dan mengkaji berbagai dokumen atau arsip yang berhubungan dengan implementasi program bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 dengan fokus pada perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi Bimbingan dan Konseling pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone

Dalam kaitannya dengan implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone, peneliti melihat bahwa berbagai prinsip implementasi Kurikulum 2013 menjadi suatu pola yang mengiringi strategi bimbingan dan konseling tersebut. Dalam hal ini, prinsip penerapan Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Atas dasar prinsip tersebut maka

kurikulum sebagai rencana adalah rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya di satu satuan atau jenjang pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai proses adalah totalitas pengalaman belajar peserta didik di satu satuan atau jenjang pendidikan untuk menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam rencana. Hasil belajar adalah perilaku peserta didik secara keseluruhan dalam menerapkan perolehannya di masyarakat.

2. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah mengenai Wajib Belajar 12 Tahun maka Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Selain itu sesuai dengan fungsi dan tujuan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta fungsi dan tujuan dari masing-masing satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan maka pengembangan kurikulum didasarkan pula atas Standar Kompetensi Lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta Standar Kompetensi satuan pendidikan.
3. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk pengetahuan dikemas secara khusus dalam satu mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk sikap dan keterampilan dikemas dalam setiap mata pelajaran dan bersifat lintas mata pelajaran dan diorganisasikan dengan memperhatikan prinsip penguatan (organisasi horizontal) dan keberlanjutan (organisasi vertikal) sehingga memenuhi prinsip akumulasi dalam pembelajaran.
4. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk Kemampuan Dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik (*mastery learning*) sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi.

5. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Atas dasar prinsip perbedaan kemampuan individual peserta didik, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan (dalam sikap, keterampilan dan pengetahuan). Oleh karena itu, beragam program dan pengalaman belajar disediakan sesuai dengan minat dan kemampuan awal peserta didik.
6. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar
7. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, konten kurikulum harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni; membangun rasa ingin tahu dan kemampuan bagi peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat hasil- hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
8. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pendidikan tidak boleh memisahkan peserta didik dari lingkungannya dan pengembangan kurikulum didasarkan kepada prinsip relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan hidup. Artinya, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan di lingkungan masyarakatnya sebagai konten kurikulum dan kesempatan untuk mengaplikasikan yang dipelajari di kelas dalam kehidupan dimasyarakat.
9. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pemberdayaan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat dirumuskan dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan budaya belajar.
10. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dikembangkan melalui penentuan struktur kurikulum, Standar Kemampuan/SK dan Kemampuan Dasar/KD serta silabus. Kepentingan daerah dikembangkan untuk membangun manusia yang tidak tercabut dari akar budayanya dan mampu berkontribusi langsung kepada masyarakat di sekitarnya. Kedua kepentingan ini saling mengisi dan memberdayakan keragaman dan kebersatuan yang dinyatakan dalam Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Instrumen penilaian hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Kekurangan tersebut harus segera diikuti dengan proses perbaikan terhadap kekurangan dalam aspek hasil belajar yang dimiliki seorang atau sekelompok peserta didik.¹¹

Menyikapi hal tersebut, A. Gaffar yang merupakan Kepala Sekolah SMAN 4 Watampone mengemukakan bahwa penyesuaian implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 dengan berbagai prinsip yang mendasari penerapan Kurikulum 2013 bisa dipahami bahwa pihak SMAN 4 Watampone memiliki komitmen yang kuat dalam menyukseskan Kurikulum 2013 sehingga pola belajar mengajar di kelas yang menggunakan kurikulum tersebut harus didukung oleh bimbingan dan konseling sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar berlangsung dengan segala langkah terukur pada setiap tahapannya.¹²

Apa yang disampaikan oleh A. Gaffar tersebut sebagai sebuah platform kebijakan implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone menunjukkan bahwa peminatan yang menjadi inti dari implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 berlangsung secara terstruktur mulai dari pra-pembelajaran, pembelajaran, sampai pada pasca-pembelajaran.

¹¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Dokumen Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012), h. 8-10.

¹²A. Gaffar, Kepala SMAN 4 Watampone, wawancara, 23 Juli 2016

Dalam observasi yang peneliti lakukan di SMAN 4 Watampone, peneliti menemukan bahwa bimbingan dan konseling berjalan dengan sangat baik dimana ada beberapa layanan bimbingan dan konseling yang ditawarkan yang dalam hal ini digambarkan oleh Murniati D yang merupakan Guru BK di lingkungan SMAN 4 Watampone sebagai berikut: ¹³

1) Layanan bimbingan konseling berupa layanan orientasi, 2) Layanan bimbingan konseling berupa layanan informasi, 3) Layanan bimbingan konseling berupa layanan penempatan dan penyaluran, 4) Layanan bimbingan konseling berupa layanan penguasaan konten, 5) Layanan bimbingan konseling berupa layanan konseling perorangan, 6) Layanan bimbingan konseling berupa layanan bimbingan kelompok, 7) Layanan bimbingan konseling berupa layanan konsultasi, 8) Layanan bimbingan konseling berupa layanan mediasi

Apa yang digambarkan oleh Murniati D sebagai salah seorang Guru BK di SMAN 4 Watampone menunjukkan bahwa ada berbagai macam jenis layanan bimbingan dan konseling dan konseling yang ditawarkan oleh Guru BK dalam mendorong pencapaian hasil maksimal peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran baik dari sisi kognitif, psikomotorik, ataupun afektifnya, termasuk dalam implementasi Kurikulum 2013.

Dalam konteks ini, peminatan yang berwujud pada pemilihan jurusan dari awal telah dilakukan dalam bentuk assessmen pada peserta didik lalu kemudian dievaluasi oleh Guru BK dan hasilnya dikomunikasikan pada masing-masing peserta didik. Hal positif yang peneliti temukan dalam lingkungan SMAN Watampone dalam kaitannya dengan implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 pola komunikasi yang digunakan pada peserta didik yang dilakukan secara bertahap yang dalam hal ini diawali dengan kelompok besar lalu kemudian mengarah pada kelompok kecil dan pada akhirnya berakhir pada perorangan dari peserta didik itu sendiri.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap A. Mapperassa yang merupakan Guru BK di lingkungan SMAN 4 Watampone, strategi yang dilakukan dalam implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 yang dilakukan secara bertahap yang dalam hal ini diawali dengan kelompok besar lalu kemudian mengarah pada kelompok kecil dan

¹³Murniati D, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 26 Juli 2016

pada akhirnya berakhir pada perorangan dari peserta didik itu sendiri dilakukan untuk memberikan kesempatan pada peserta didik dalam menentukan peminatannya berdasarkan pilihan yang tepat dan bukan suatu pilihan yang sifatnya insidental dan dipengaruhi oleh rekannya. Dalam kelompok besar, peminatan disampaikan secara umum sehingga peserta didik telah mendapatkan gambaran umum tentang peminatannya dalam Kurikulum 2013 yang disertai dengan berbagai konsekuensi yang akan dihadapinya dengan pilihan berupa peminatan tersebut. Adapun pada kelompok kecil, peserta didik diberikan kesempatan untuk kembali melakukan refleksi terhadap peminatan yang dipilihnya dengan melakukan konformasi personal terhadap Guru BK dan sesama peserta didik sehingga peminatan yang dipilihnya menjadi semakin terarah. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan pendekatan perorangan sehingga peminatan tersebut menjadi suatu pilihan yang telah dipikirkan secara matang termasuk pada konformasi individu yang umumnya dilakukan dengan *face to face* antara Guru BK dan peserta didik yang bersangkutan.¹⁴

Apa yang digambarkan oleh A. Mapperassa sebagai suatu langkah terstruktur implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone merupakan suatu penjabaran dari kerangka yuridis normatif implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:¹⁵

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari sisi penjelasannya, dapat dipahami bahwa potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau

¹⁴A. Mapperassa, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 27 Juni 2016

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam <http://qoqozroqu.blogspot.co.id>. (22 Juli 2016)

dipergunakan secara maksimal, spiritual keagamaan adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta, kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang, kecerdasan atau yang biasa dikenal dengan IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, serta akhlak mulia berarti perilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun.

Agar bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone dapat berjalan secara maksimal, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, Sitti Faridah M yang merupakan Guru BK di lingkungan SMAN 4 Watampone mengemukakan bahwa tim Guru BK di lingkungan SMAN 4 Watampone menyusun program secara bertahap dan integratif mulai dari program harian, program mingguan, program bulanan, program semesteran, serta program tahunan. Dalam implementasinya, lanjut Sitti Faridah M, berbagai program tersebut pada dasarnya seperti sebuah bangunan yang saling terkait satu sama lain. Apa yang ada pada program tahunan harus dijabarkan pada program semesteran, apa yang ada pada program semesteran harus dijabarkan pada program bulanan, apa yang ada pada program bulanan harus dijabarkan pada program mingguan, dan apa yang ada pada program mingguan harus dijabarkan pada program harian.¹⁶

Dalam penelusuran peneliti terhadap implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone, ditemukan bahwa rangkaian tahapan bimbingan dan konseling tersebut mulai dari program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan, serta program harian diaplikasikan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Program tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 yang meliputi seluruh kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing kelas di SMAN 4 Watampone.
2. Program semesteran, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu semester yang merupakan penjabaran program tahunan.

¹⁶Sitti Faridah M, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 27 Juni 2016

3. Program bulanan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu bulan yang merupakan penjabaran program semesteran.
4. Program mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu minggu yang merupakan penjabaran program bulanan.
5. Program harian, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan penjabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan (SATLAN) dan atau satuan kegiatan pendukung (SATKUNG).

Dalam kaitannya dengan upaya untuk mengidentifikasi peminatan peserta didik yang merupakan inti dari implementasi bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013, peneliti melihat bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan seperti yang digambarkan oleh Murniati D yang dalam hal ini terdiri atas psikotes, wawancara, serta angket.¹⁷

Dalam penelusuran peneliti di SMAN 4 Watampone, berbagai strategi yang dilakukan dalam mengidentifikasi peminatan peserta didik sebagai kerangka operasional bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone yang menggunakan psikotes diarahkan untuk melihat pilihan peserta didik dan konsistensi mereka dalam pilihan yang telah ditetapkannya. Dalam upaya tersebut, peneliti menemukan bahwa Guru BK di lingkungan SMAN 4 Watampone mempergunakan beberapa media gambar yang dalam hal ini diberikan secara tertutup pada mereka untuk kemudian dipilih dalam jumlah tertentu untuk kemudian dikalkulasikan untuk menentukan peminatan peserta didik dalam Kurikulum 2013. Dalam pengembangannya, berbagai gambar yang dimunculkan memiliki keterkaitan yang identik dengan berbagai peminatan yang ditawarkan dalam implementasi bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013. Adapun dalam hal penggunaan psikotes untuk menguji konsistensi peserta didik atas pilihan mereka dalam peminatan, peneliti menemukan bahwa bentuk soal psikotes yang diberikan adalah berupa penggunaan media kolom yang diberikan secara bebas pada peserta didik untuk mengisi kolom dengan nama benda apapun yang mereka ingin isikan pada kolom tersebut yang jumlahnya

¹⁷Murniati D, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 26 Juli 2016

bervariasi. Semakin dekat kategori kata benda yang dituliskan maka semakin tinggi tingkat konsistensi mereka atas pilihan yang dibuat sebaliknya semakin bervariasi kategori kata benda yang dituliskan semakin rendah tingkat konsistensi mereka atas pilihan yang dibuat.

Adapun dalam hal penggunaan angket, peneliti menemukan bahwa poin-poin peminatan dari bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 diberikan dengan memberikan angket terbuka dan angket tertutup pada peserta didik. Dalam angket terbuka, peserta didik diberikan kesempatan untuk menentukan peminatan mereka dalam Kurikulum 2013 setelah mereka diberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksudkan dengan peminatan tersebut dengan segala konsekuensi atas pilihan yang diambil dalam peminatan tersebut. Dalam konteks ini, peserta didik lebih mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menuliskan pilihan-pilihan mereka atas peminatan yang ditawarkan. Berbeda halnya dengan angket tertutup yang juga diberikan bersamaan dengan angket terbuka, terlihat bahwa poin-poin pilihan dalam peminatan telah diatur sedemikian rupa oleh Guru BK yang tentunya memanfaatkan hasil assessmen yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam hal penggunaan wawancara, peneliti menemukan bahwa Guru BK di SMAN 4 Watampone mempergunakan wawancara sebagai suatu media identifikasi pilihan peserta didik atas peminatan yang ditawarkan dalam bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013. Dalam proses tersebut, peserta didik yang dianggap memiliki kendala dalam hal peminatan diberikan kesempatan untuk menggambarkan kendala apa yang mereka hadapi.

Dalam kaitannya dengan evaluasi atas bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone, St. Hafidah yang merupakan Guru BK di lingkungan SMAN 4 Watampone mengemukakan bahwa penilaian kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dua jenis yaitu: (1) penilaian hasil; dan (2) penilaian proses. Penilaian hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dilakukan melalui:¹⁸

1. Penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling dalam

¹⁸St. Hafidah, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 26 Juli 2016

Kurikulum 2013 untuk mengetahui perolehan peserta didik yang dilayani.

2. Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu minggu sampai dengan satu bulan) setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan/kegiatan terhadap peserta didik.
3. Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu bulan sampai dengan satu semester) setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan dan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 terhadap peserta didik.

Apa yang menjadi implementasi dari bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone sebagaimana diuraikan di atas melalui konformasi data lapangan menunjukkan bahwa implementasi dari bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone mengerucut dalam hal peminatan dengan segala dimensinya.

b. Hambatan Implementasi Bimbingan dan Konseling pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone

Dalam kaitannya dengan hambatan implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone, peneliti menemukan bahwa jumlah Guru BK yang ada di SMAN 4 Watampone tidak berbanding lurus dengan jumlah peserta didik yang ada. Menurut Siti Faridah M, jumlah Guru BK yang ada di SMAN 4 Watampone adalah 4 orang yang dalam hal ini adalah A. Mapparessa, Siti Faridah M, Hafidah, dan Murniati D. Keempat Guru BK tersebut dalam tugas dan fungsinya menangani kurang lebih 1500 peserta didik yang tersebar pada berbagai tingkatan level pendidikan yang ada di SMAN 4 Watampone.¹⁹ Hal ini tentunya membawa suatu hambatan tersendiri dalam melakukan bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 karena proses bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan suatu proses yang membutuhkan sumber daya manusia yang banyak.

¹⁹Sitti Faridah M, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 27 Juni 2016

Menyikapi keterbatasan jumlah guru BK di SMAN 4 Watampone, A. Gaffar yang merupakan kepala sekolah mengemukakan keprihatinannya dengan menyatakan bahwa apa yang ada di sekolah yang dipimpinnya berbeda jauh dengan batas maksimal dari jumlah peserta didik yang harus ditangani oleh seorang Guru BK dimana beban kerja Guru BK adalah mampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 orang peserta didik dan paling banyak 250 orang peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk layanan tatap muka terjadwal di kelas untuk layanan klasikal dan/atau di luar kelas untuk layanan perorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang memerlukan. Sementara itu, beban kerja Guru BK yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah adalah membimbing 40 orang peserta didik dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah membimbing 80 orang peserta didik. Oleh karena itu, idelanya dengan jumlah peserta didik sebanyak 1500 orang maka SMAN 4 membutuhkan Guru BK sebanyak 6 orang.²⁰

Di samping itu, hambatan lain yang dialami oleh Guru BK yang ada di SMAN 4 Watampone adalah perbedaan pilihan orang tua dan peserta didik dalam hal peminatan, Dalam konteks ini, campur tangan orang tua terhadap peminatan peserta didik membuat peserta didik menjadi kurang mendapatkan motivasi dalam memilih peminatan yang sebenarnya bukan berasal dari pilihannya. Menyikapi hal tersebut, A. Mapparessa mengemukakan bahwa campur tangan orang tua dalam hal peminatan berbagai program pembelajaran yang ditawarkan dalam Kurikulum 2013 membuat peserta didik mengikuti pembelajaran dengan tidak maksimal.²¹ Hambatan implementasi bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 seperti yang digambarkan oleh A. Mapparessa tersebut yang dalam hal ini adalah perbedaan peminatan antara orang tua dan peserta didik yang membuat peserta didik mengalah begitu saja dan kehilangan motivasi

²⁰A. Gaffar, Kepala SMAN 4 Watampone, wawancara, 23 Juli 2016

²¹A. Mapparessa, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 27 Juni 2016

belajarnya jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kelima dari implementasi Kurikulum 2013 yang dalam hal ini berbunyi:²²

Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Atas dasar prinsip perbedaan kemampuan individual peserta didik, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan (dalam sikap, keterampilan dan pengetahuan). Oleh karena itu, beragam program dan pengalaman belajar disediakan sesuai dengan minat dan kemampuan awal peserta didik.

Realitas yang seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja karena minimnya motivasi peserta didik dalam mengikuti hasil peminatan yang ada pada Kurikulum 2013 karena adanya campur tangan orang tua yang jelas-jelas berbeda dengan peminatan peserta didik akan berimplikasi pada respon mereka terhadap kegiatan pembelajaran dalam spektrum Kurikulum 2013. Hal ini telah diisyaratkan dalam teori kepribadian yang diangkat oleh Sigmund Freud disebutkan perasaan merupakan suatu aktivitas pribadi dimana pribadi tersebut tidak bisa dipisahkan antara fisik dan psikisnya sebagai dua substansi yang terpisah. Konsekuensinya, dimensi psikis sangat berpengaruh terhadap dimensi psikisnya. Dalam teori kepribadian tersebut, Sigmund Freud menyatakan bahwa kecemasan timbul apabila terdapat pertentangan antara dua prinsip yaitu prinsip kesenangan (*pleasure principle*) dan prinsip kenyataan (*reality principle*).²³

Senada dengan apa yang disampaikan oleh oleh Singgih D. Gunarsa tersebut, Bobbi dePorter dan Mike Hernacki, mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik apabila telah menghadirkan kecemasan (*anxiety*) karena kurang terakomodasinya kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai seorang individu dengan segala kekhasannya, akibatnya bisa diprediksi bahwa mereka akan menjadi tertutup karena perasaan-perasaan negatif tersebut kemudian memacu otak retil

²²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Dokumen Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012), h. 9.

²³Singgih D. Gunarsa, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Mutiara, 1983), h. 136

(*rhombencephalon/hindbrain*) mereka, sebagai otak yang berkaitan langsung dengan insting mempertahankan hidup untuk menekan otak mamalia (*mesencephalon/mildbrain*) ataupun otak neokorteks (*proencephalon/forebrain*) sehingga layaknya seekor reptil yang apabila merasa terancam maka hanya memiliki dua pilihan lari atau menyerang.²⁴

Sebagai antitesa dari apa yang ada di atas, Sitti Faridah M menyatakan bahwa ada juga di antara peserta didik yang dalam hal peminatan menjatuhkan pilihan pada suatu pilhan di luar kemampuannya. Dalam konteks ini, apa yang dia lakukan tersebut menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.²⁵ Apa yang dinyatakan oleh Sitti Faridah M merupakan suatu hambatan tersendiri dalam implementasi bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013. Hal ini dipertegas oleh St. Hafidah bahwa ada di antara peserta didik yang menjatuhkan pilihan dalam hal peminatan yang sebenarnya berada di luar kemampuannya sehingga ada di antara mereka yang kemudian mengubah pilihan di tengah jalan.²⁶

Dalam konteks ini, peneliti melihat bahwa munculnya berbagai hambatan dalam implementasi bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013, termasuk pada hambatan yang terlihat dari kesalahan menentukan peminatan disebabkan oleh efektivitas pembimbing dan konselor belum maksimal yang kemudian bertemu dengan belum efektifnya peserta didik sebagai klien. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa efektivitas Guru BK sebagai pembimbing dan konselor serta peserta didik sebagai klien merupakan suatu persyaratan utama yang harus dilakukan yang dalam hal ini masing-masing pihak harus lebih aktif pada proses bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 tersebut. Kurang efektifnya Guru BK sebagai pembimbing dan konselor disebabkan oleh kendala minimnya keseimbangan antara jumlah Guru BK dan peserta didik yang harus dilayani dalam proses bimbingan dan konseling tersebut. Minimnya jumlah dari sisi kuantitas tersebut berimplikasi pada beberapa dimensi efektivitas bimbingan dan konseling yang dalam hal ini adalah efektivitas menjalankan tugas dan

²⁴Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, *Quantum Learning*, (Bandung: Kaifa, 2003), h. 26

²⁵Sitti Faridah M, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 27 Juni 2016

²⁶St. Hafidah, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 26 Juli 2016

fungsi, efektivitas dalam pembuatan rencana dan program, serta efektifitas dalam pelaksanaan aturan.

Dalam hal efektivitas menjalankan tugas dan fungsi, Guru BK yang hanya berjumlah empat orang yang kemudian diwajibkan menjalankan tugas dan fungsi yang dalam hal ini adalah pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah khususnya dalam hal 1) pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat, 2) pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, 3) pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah secara mandiri, 4) serta pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir, maka keterbatasan jumlah secara kuantitas tersebut merupakan suatu hambatan tersendiri.

Dalam kaitannya dengan efektivitas dalam pembuatan rencana dan program serta efektifitas dalam pelaksanaan aturan yang belum berjalan maksimal, A. Mapparessa mengemukakan bahwa para Guru BK di lingkungan SMAN 4 Watampone pada dasarnya telah menyusun rencana dan program secara terstruktur. Dalam implementasinya, berbagai rencana dan program yang telah disusun secara terstruktur tersebut dibenturkan dengan keterbatasan Guru BK secara kuantitas sehingga kadang-kadang hasilnya menjadi kurang maksimal.²⁷

Dalam kaitannya dengan efektivitas peserta didik sebagai klien, peneliti melihat bahwa banyak di antara peserta didik yang bersifat pasif dalam menyikapi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013. Konsekuensinya, pilihan yang mereka jatuhkan pada peminatan menjadi pilihan yang tidak didasari oleh upaya pro-aktif dalam melihat kelebihan dan kekuarannya sehingga tidak mengherankan kemudian apabila ada di

²⁷A. Mapparessa, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 27 Juni 2016

antara mereka yang menjatuhkan pilihan pada peminatan yang berada di luar kemampuannya.

a. Upaya yang Dilakukan oleh SMAN 4 Watampone dalam Mengatasi Berbagai Hambatan Bimbingan dan Konseling pada Kurikulum 2013

Dalam upaya mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh SMAN 4 Watampone dalam mengatasi berbagai hambatan bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013, peneliti berangkat dari berbagai hambatan yang telah dikemukakan di atas yang dalam hal ini adalah keterbatasan jumlah Guru BK secara kuantitas. Sebagaimana dipahami bahwa idelanya seorang Guru BK yang tidak menduduki jabatan apapun menangani minimal 150 orang peserta didik dan paling banyak 250 orang peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk layanan tatap muka terjadwal di kelas untuk layanan klasikal dan/atau di luar kelas untuk layanan perorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang memerlukan. Dalam konteks tersebut, SMAN 4 Watampone mengatasi hambatan keterbatasan jumlah Guru BK dengan melakukan sistem pendampingan oleh guru-guru mata pelajaran selain Guru BK dalam melakukan berbagai layanan bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 yang dalam hal ini adalah bisa berwujud salah satu di antara jenis layanan sesuai dengan komperensi yang dimiliki sebagai berikut: ²⁸

1. Layanan orientasi berupa layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru.
2. Layanan informasi berupa layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.
3. Layanan penempatan dan penyaluran berupa layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di

²⁸A. Mapperessa, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 27 Juni 2016

dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program latihan, magang, dan kegiatan ekstra kurikuler.

4. Layanan penguasaan konten berupa layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.
5. Layanan konseling perorangan berupa layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya.
6. Layanan bimbingan kelompok berupa layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.
7. Layanan konseling kelompok berupa layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok.
8. Layanan konsultasi berupa layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik
9. Layanan mediasi berupa layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka.

Dalam upaya tersebut, guru mata pelajaran tersebut tetap melakukan konsultasi terhadap Guru BK yang tentunya memiliki pengalaman yang lebih dalam implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 dengan segala karakteristik dan kekhasan yang dimilikinya.

Adapun dalam kaitannya dengan hambatan berupa perbedaan pilihan antara orang tua dan peserta didik dalam peminatan yang diajukan sehingga campur tangan orang tua terhadap peminatan peserta didik membuat peserta didik menjadi kurang mendapatkan motivasi dalam memilih peminatan yang sebenarnya bukan berasal dari pilihannya, peneliti melihat bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan terhadap orang tua dan berupa menjembatani perbedaan pilihan dalam penentuan peminatan dalam Kurikulum 2013. Dalam konteks ini, layanan bimbingan dan konseling berupa layanan

mediasi berupa layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka mengambil peran penting.²⁹

Dalam penelusuran peneliti di SMAN 4 Watampone, munculnya hambatan berupa perbedaan pilihan antara peserta didik dan orang tuanya ataupun kesalahan dalam penentuan pilihan peminatan merupakan hambatan yang masih berada pada skala kecil. Hambatan terbesar dalam implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 adalah keterbatasan jumlah Guru BK secara kuantitas yang pada ujung-ujungnya bermuara pada menurunnya efektivitas bimbingan dan konseling yang dilakukan yang dalam hal ini mencakup ketidakefektifan menjalankan tugas dan fungsi, ketidakefektifan dalam pembuatan rencana dan program, serta ketidakefektifan dalam pelaksanaan aturan.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan dikonfirmasi dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone menunjukkan bahwa peminatan peserta didik dalam Kurikulum 2013 menjadi suatu hal yang mendasari bimbingan dan konseling dalam berbagai dimensinya mulai dari kerangka filosofinya sampai pada implementasi teknisnya.
2. Hambatan terbesar yang dihadapi dalam implementasi bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone adalah keterbatasan jumlah guru bimbingan dan konseling sehingga hambatan tersebut berimplikasi pada ketidakefektifitas bimbingan dan konseling yang dilakukan khususnya dalam hal ketidakefektifan menjalankan tugas dan fungsi, ketidakefektifan dalam pembuatan rencana dan program, serta ketidakefektifan dalam pelaksanaan aturan. Adapun dari hambatan yang lainnya umumnya berasal dari peserta didik sebagai klien berupa perbedaan peminatan dengan orang tuanya ataupun kesalahan dalam penentuan pilihan peminatan.

²⁹Sitti Faridah M, Guru BK SMAN 4 Watampone, wawancara, 27 Juni 2016

3. Dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam bimbingan dan konseling pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Watampone, pihak sekolah memaksimalkan guru mata pelajaran yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi pembimbing dan konselor sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki yang tentunya tetap berada di bawah arahan dari guru bimbingan dan konseling.

DAFTAR RUJUKAN

- Bashori, *Manajemen Perubahan KTSP 2006 ke Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Kediri*, (Tesis: Program Studi Pendidikan Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 49-50
- Departemen Pendidikan Nasional. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal* (Bandung: UPI Bandung, 2007), h. 197
- Departemen Pendidikan Nasional. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, h. 197
- E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 164.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Modul Diklat Peningkatan Kompetensi Guru BK/Konselor SMP/MTs* (Jakarta: Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani Dan Bimbingan Konseling, 2013), h. 2
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. v
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 111. Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah
- Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4